



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Penerimaan Bantuan Luar
Negeri Jokowi Dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan
2015**

Skripsi

Oleh

Audi William Santoso

2016330081

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Penerimaan Bantuan
Luar Negeri Jokowi Dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan
Lahan 2015**

Skripsi

Oleh

Audi William Santoso

2016330081

Pembimbing

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.

Bandung

2019

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Audi William Santoso
Nomor Pokok : 2016330081
Judul : Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Penerimaan
Bantuan Luar Negeri Jokowi Dalam Penanganan
Kebakaran Hutan dan Lahan 2015

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana

Pada Selasa, 7 Januari 2020

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D. :

Sekretaris

Dr. I Nyoman Sudira :

Anggota

Sapta Dwikardana, Ph.D :

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Audi William Santoso

NPM : 2016330081

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Penerimaan Bantuan Luar Negeri
Jokowi Pada Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan 2015

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya tulis yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 10 Desember 2019
Penulis,



Audi William Santoso

ABSTRAK

Nama : Audi William Santoso

NPM : 2016330081

Judul Skripsi : Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Penerimaan Bantuan Luar Negeri Jokowi Dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan 2015

Penelitian ini menganalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian “Bagaimana Tekanan Internasional dan Legitimasi Politik Domestik Mempengaruhi Kebijakan Jokowi Dalam Penerimaan Bantuan Luar Negeri Untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2015?”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengaruh dari tekanan internasional dan legitimasi domestik dalam kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini menggunakan konsep Realisme Neo-Klasik dan teori *International Pressure-Domestic Legitimacy*. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menemukan bahwa penerimaan bantuan luar negeri Jokowi merupakan hasil dari *Compromising in Deeds*. *Compromising in Deeds* dilakukan karena Jokowi mendapatkan tekanan internasional yang tinggi dan disisi lain memiliki legitimasi politik yang rendah. Dengan keadaan tersebut maka, Jokowi menerima bantuan luar negeri dari Singapura dan Malaysia.

Kata Kunci: Kebakaran Hutan dan Lahan, Determinan, Penerimaan Bantuan Luar Negeri

ABSTRACT

Name : Audi William Santoso

Student Number : 2016330081

Title : *Factors Influencing the Jokowi's Foreign Aid Acceptance Policy in Handling 2015 Forest and Land Fires*

This study analyzes to answer the research question "How Does International Pressure and Domestic Political Legitimacy Affect Jokowi's Policy in Accepting Foreign Aid for Handling Forest and Land Fires in 2015?". This study aims to illustrate the influence of international pressure and domestic legitimacy in the policies taken by President Joko Widodo in handling forest and land fires. This research uses the concept of Neo-Classical Realism and International Pressure-Domestic Legitimacy theory. The research methodology used is a qualitative method with a case study approach. This study found that the acceptance of Jokowi's foreign aid was the result of Compromising in Deeds. Compromising in Deeds was carried out because Jokowi received high international pressure and on the other hand had low political legitimacy. Under these circumstances, Jokowi received foreign assistance from Singapore and Malaysia.

Keywords: Forest and Land Fires, Determinants, Acceptance of Foreign Aid

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat yang diberikan dalam proses penulisan skripsi ini. Penulis juga hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing – Mas Nyoman Sudira, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing ditengah kesibukannya agar skripsi penulis yang berjudul ‘Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Penerimaan Bantuan Luar Negeri Jokowi Dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan 2015’ dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna dalam studi Hubungan Internasional, terutama untuk penelitian lebih mendalam terkait kebijakan luar negeri. Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak sempurna, sehingga penulis mengapresiasi kritik, komentar, dan saran yang dapat membantu perkembangan studi terkait topik skripsi ini.

Bandung, 10 Desember 2019

Audi William Santoso

Ucapan Terima Kasih

1. Pertama dan utama, saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus, karena selalu mendampingi dan atas kehendaknya pula saya diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada keluarga, Ibu dan kakak-kakak yang telah menjadi bagian besar dalam hidup penulis.
3. Untuk pembimbing saya, Mas Nyoman yang selalu menyediakan waktunya untuk memberikan bimbingan skripsi dan berusaha menenangkan saya ketika sidang kemarin.
4. Untuk dosen penguji, Mas Sapta dan Mas Pur yang telah menguji selama sidang dan memberikan kritik dan saran yang membangun yang berguna untuk kedepannya.
5. Untuk teman-teman kos Lusiana Hall, Ivan Agus, Devi, Nicho, Isel, Keke, Evan dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu karena banyak. Terima kasih sudah membuat perkuliahan menjadi berwarna.
6. Untuk rekan-rekan diawal perkuliahan Ananda Samuel, Adit, Eka, terimakasih sudah mendukung dan membantu dalam awal-awal perkuliahan.
7. Untuk delegasi Prakdip South Africa, Yunis, Yohana, Davin, Jovanka, Febby, Farrel, Sheila, dan Dena yang dalam ketika masa prakdip tetap juga membantu untuk skripsi.
8. Untuk Michael Hendri, Elizabeth, Ko Yoki, Bobby Benjamin, Aldrich, dan Eunice yang selalu menguatkan dalam penulisan skripsi. Tanpa kalian, skripsi ini hanya tulisan kosong belaka.
9. Dan untuk Universitas Katolik Parahyangan, Fakultas Ilmu Sosial, dan Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Terima kasih sudah menjadi tempat saya untuk bertumbuh dan membina saya dalam proses pembelajaran.

Daftar Isi

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
Daftar Isi	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Kajian Literatur	9
1.7 Kerangka Pemikiran.....	13
1.8 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	21
1.8.1 Metode Penelitian	21
1.8.2 Teknik pengumpulan data.....	21
1.9 Sistematika Penulisan.....	22
BAB II	24
Kondisi Internasional dan Domestik Sebagai Pertimbangan Bagi Joko Widodo.....	24
2.1. Faktor Internasional.....	25
2.1.1. Pola Interaksi di Asia Tenggara.....	25
2.1.2. Hukum Internasional Soal Kebakaran Hutan dan Lahan.....	27
2.2. Kondisi Domestik yang Menjadi Pertimbangan Bagi Jokowi	32
2.2.1. Ideologi Pemerintahan: Demokrasi sebagai Sistem Pemerintahan.....	32
2.2.2. Preferensi dan Opini Para Pengambil Kebijakan.....	34
2.2.3. Opini Publik Tentang Kebakaran Hutan dan Lahan	38
2.2.4. Kekuatan Relatif Indonesia Dalam Penganan Asap.	43
BAB III	45
Interaksi Antara Tekanan Internasional dan Legitimasi Domestik Sebagai Pembentuk Kebijakan Joko Widodo.....	45
3.1. Penguatan Tekanan Internasional Atas Bencana Kebakaran hutan dan lahan Di Indonesia	46
3.1.1. Latar Belakang Ketegangan di Asia Tenggara Akibat Kabut Asap dari Indonesia.....	46

3.1.2. Tuntutan Tanggung Jawab Dari Malaysia dan Singapura Untuk Indonesia, Agar Menangani Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Sesuai Hukum Internasional.	52
3.2. Legitimasi Domestik Rendah yang Dimiliki Jokowi	55
3.2.1. Perbandingan Kekuatan Oposisi dan Koalisi Jokowi di parlemen	56
3.2.2. Penurunan Kepercayaan Publik Terhadap Jokowi	58
3.3. Penerimaan Bantuan Luar Negeri Sebagai Reaksi Atas Tekanan Internasional yang Tinggi dan Legitimasi Domestik yang Rendah.....	62
BAB IV	58
KESIMPULAN.....	58
Daftar Pustaka.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peristiwa bencana alam kebakaran hutan di Indonesia sudah menjadi bencana yang terjadi setiap tahunnya. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun 2015 bukanlah kali pertama Indonesia mengalami kebakaran terparah. Sebelumnya pada tahun 1997, 2005, dan 2013 Indonesia juga mengalami kebakaran hutan dan lahan yang parah dalam sejarah. Salah satu efek dari kebakaran hutan dan lahan adalah kabut asap yang mengakibatkan pencemaran udara. Kabut asap ini membuat udara menjadi tercemar dan menjadi tidak layak untuk dihirup sehingga bisa memberikan dampak kesehatan yang fatal. Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat yaitu berupa penyakit kesehatan dan terhentinya aktivitas seperti sosial dan ekonomi karena pandangan tertutup kabut asap.¹

Pada tahun 2015, kebakaran hutan dan lahan membuat 2,6 juta hektare hutan dan lahan terbakar dengan 120 ribu titik api, yang membuat daerah seperti Sumatera Selatan, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan dinyatakan darurat asap dan menyebabkan

¹ Raditya Jati, 2016, *Resiko Bencana Indonesia*, Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, hal 98

kematian pada 19 penduduk, 130.000 orang menderita saluran pernafasan, dan kerugian sebesar US\$34 triliun.²

Di Daerah Pekanbaru, Indeks Standar Pencemaran Udara atau disingkat ISPU, menunjukkan kadar ISPU berada pada rentang 34,7 hingga tertinggi pada 778,0 dimana batas berbahaya ISPU maksimum hanya mencapai 500,0.³ Hal ini menandakan indeks pencemaran akibat kebakaran hutan berada pada fase yang sangat mengkhawatirkan karena telah melewati ambang batas maksimum. Akibatnya, aktivitas masyarakat menjadi terganggu bahkan beberapa kegiatan seperti sekolah dan tempat kerja harus diliburkan karena bahaya yang terkandung pada udara yang ada di daerah tersebut. Aktivitas masyarakat yang terganggu bukan hanya ada di daerah Indonesia saja, aktivitas di negara lain seperti Singapura dan Malaysia juga terganggu akibat kebakaran tersebut.

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia berefek langsung pada kualitas udara di Singapura. Dalam laporan Departemen Lingkungan Singapura sepanjang tahun 2015, udara di Singapura berada pada level baik dan sedang dengan intensitas 83,5% atau 305 hari udara di Singapura berada di level sedang dan 4% atau 14 hari di level baik dari total 365 hari, 12,5% berada pada tingkat tidak sehat 40 hari, sangat tidak sehat 5 hari, dan berbahaya 1 hari.⁴ Sedangkan Malaysia, terkena dampak di daerah Selangor, Kedah dan Kuching di Sarawak. Kedua daerah

²Bush, Robin. 2016. INDONESIA IN 2015. *Southeast Asian Affairs*: 131-144, <https://search.proquest.com/docview/1787062702/EA9A3269BB3B4A48PQ/2?accountid=31495>

³Asep Hermawan, "Peningkatan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) dan Kejadian Gangguan Saluran Pernapasan di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ekologi Kesehatan*, vol 15, (2016): 79

⁴National Environment Agency, Environmental Protection Division Annual Report 2015, https://www.nea.gov.sg/docs/default-source/resource/publications/environmental-protection-division-annual-report/epd_areport_2015.pdf

tersebut mengalami dampak asap dari kebakaran hutan selama dua minggu pada periode September hingga Oktober, yang mengakibatkan daerah tersebut terpapar polusi sebesar 20 Juta ton karbon dioksida per hari, dengan indeks polusi sebesar 255 API.⁵

Situasi ini membuat Indonesia ditekan oleh Malaysia dan Singapura yang mendesak Indonesia supaya segera menyelesaikan langsung permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Malaysia dan Singapura bahkan mendesak pemerintah Indonesia untuk menerima bantuan yang ditawarkan mereka. Singapura bahkan juga meminta pemerintah Indonesia untuk memberikan daftar perusahaan mana saja yang tampil sebagai penyebab dalam kebakaran hutan dan lahan.

Hal ini dikarenakan Indonesia sudah menyetujui dan meratifikasi perjanjian bersama mengenai kabut asap lintas batas atau yang disebut *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*. Pada tanggal 16 September 2014, Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut dan pada tanggal 20 Januari 2015, Indonesia menyerahkan dokumen ratifikasi tersebut ke Sekretariat ASEAN.⁶ Perjanjian kerjasama tersebut menuntut Indonesia untuk segera menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan dan bekerja sama dalam penanganannya.⁷ Dengan menyetujui dan meratifikasi perjanjian tersebut, artinya Indonesia sudah sepakat

⁵ Translated by ContentEngine, L. L. C. 2019. Indonesia's wildfires cover toxic fog in southeast asia. *CE Noticias Financieras*, Sep 21, 2019. <https://search.proquest.com/docview/2295336127?accountid=31495> (diakses September 24, 2019)

⁶ "ASEAN Indonesia Regional Haze Agreement Ratified", diakses pada 8 Januari 2020, <https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/asean-indonesia-regional-haze-agreement-ratified/>

⁷ ASEAN nations urge indonesia to tackle haze pollution. (2011, Sep 24). *BBC Monitoring Asia Pacific*

untuk mengikuti isi dari perjanjian tersebut. Dari sebab itu, tanggung jawab Pemerintah Indonesia terkait pengendalian kabut asap tidak hanya pada masyarakat dalam negeri tetapi juga kepada negara lain sebagai bukti itikad baik dari perjanjian tersebut.⁸ Maka, tekanan internasional dari Singapura dan Malaysia bertujuan untuk menagih itikad baik dari perjanjian yang sudah disetujui oleh Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah

Bantuan luar negeri didefinisikan sebagai perpindahan sumber daya secara sukarela seperti modal, barang atau jasa dari satu negara ke organisasi internasional, organisasi non pemerintah, atau negara dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan manusia dari penerima.⁹ Bantuan bisa berupa memberikan bantuan kemanusiaan, mendukung kemajuan ekonomi dan sosial, mempromosikan demokratisasi, mengatasi masalah global, dan mengelola transisi pasca konflik.¹⁰

Salah satu faktor pemberian bantuan luar negeri dari Singapura dan Malaysia adalah untuk mengatasi permasalahan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan dari Indonesia. Dengan keadaan tersebut, kedua negara mencoba untuk memberikan bantuan luar negeri kepada Indonesia untuk penanganan kabut asap. Singapura memberikan pesawat hercules untuk pemadaman dan ahli IT untuk membantu dari sisi satelit.¹¹ Pemberian ini ditawarkan oleh Menteri Lingkungan

⁸ Agis Ardhiyansyah, "Konsekuensi Hukum bagi Indonesia tentang pengendalian pencemaran asap lintas batas pasca ratifikasi ASEAN Agreement on transboundary haze pollution", *Jurnal Perspektif*, Vol XXI No 1, 2016

⁹ Carol Lancaster, *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics*, (Chicago: The University of Chicago Press, 2006), Hal 9

¹⁰ Ibid, Hal 12

¹¹ "Hazardous Haze Chokes Southeast Asia", *AlJazeera*, diakses pada 8 Januari 2020, <https://www.aljazeera.com/news/2015/10/hazardous-haze-southeast-asia-indonesia-151007023814717.html>

Hidup dan Sumber Daya Air pada tanggal 10 September 2015, menurutnya permasalahan kabut asap memiliki dampak yang besar untuk kesehatan dan kehidupan masyarakat di Indonesia dan banyak orang di regional.¹² Sedangkan Malaysia, memberikan bantuan militer untuk membantu Indonesia dalam pembuatan hujan buatan di daerah Kalimantan karena berdekatan dengan Sarawak. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Malaysia Hishammuddin Husein yang beralasan, apabila kebakaran ini tidak diselesaikan dan ditangani dengan baik, maka bisa saja merusak hubungan regional.¹³ Maka dari itu, Hishammuddi mengontak Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryamudu pada 20 September 2015, untuk menindaklanjuti tawaran tersebut.¹⁴

Selain menghadapi faktor internasional, Jokowi juga mendapatkan tekanan dari domestik yang bersumber dari tekanan-tekanan publik untuk Jokowi agar melakukan penanganan segera. Hal ini dikarenakan korban akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sudah cukup banyak. Penduduk yang terkena infeksi saluran pernafasan akibat kabut asap berjumlah 11.456 orang per 11 September 2015 yang bertambah setiap harinya dengan anak-anak yang banyak sebagai korban.¹⁵ Selain hal tersebut, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia juga terjadi

¹² “Opening Speech by Dr Vivian Balakrishnan, Minister for the Environment and Water Resources, for the Second Reading of the Transboundary Haze Pollution Bill”, *Minister of The Environment and Water Resources*, <https://www.mewr.gov.sg/search?q=haze%20>

¹³ “Malaysia ready to send armed forces to help fight haze: Minister”, *Today World*, diakses 8 Januari 2020, <https://www.todayonline.com/world/asia/malaysia-ready-send-armed-forces-help-fight-haze-minister>

¹⁴ “Malaysia offers military assistance fighting forest fire haze”, *Tempo*, diakses 8 Januari 2020, <https://en.tempo.co/read/705111/malaysia-offers-military-assistance-fighting-forest-fire-haze>

¹⁵ “Tewas akibat tercekik asap”, *Liputan 6*, diakses pada 8 Januari 2020, <https://www.liputan6.com/news/read/2317496/tewas-akibat-tercekik-asap>

semakin parah. Per tanggal 26 September 2015 misalnya, jarak pandang akibat kabut asap hanya berjarak 10 meter hingga matahari tidak bisa terlihat.¹⁶

Dalam kasus bantuan yang ditawarkan oleh Singapura dan Malaysia, Jokowi sebagai pengambil keputusan pada awalnya memutuskan untuk menolak. Penolakan didasari oleh keyakinan bahwa Indonesia masih sanggup untuk memadamkan api secara mandiri.¹⁷ Melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pada 12 September 2015, Indonesia menyatakan tidak membutuhkan bantuan luar negeri karena masih sanggup mengatasi permasalahan ini.¹⁸ Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 30 September 2015 memberikan pernyataan kepada publik, mengatakan pemerintah masih sungguh-sungguh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan tidak mau keberhasilan pemadaman diklaim oleh negara-negara lain.¹⁹ Bahkan lebih lanjut, Pramono Anung juga mengatakan bahwa pemerintah selalu memperhatikan masyarakat. Disisi lain, penolakan tersebut mungkin bisa dikarenakan orientasi kebijakan luar negeri Jokowi yang berorientasi kedalam. Dalam visi misi hubungan luar negeri Jokowi untuk pemerintahan 2014-2019, Jokowi menulis yakni ”terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.²⁰

¹⁶ “Bencana kabut asap di Palangkaraya sudah 2 bulan warga tak lihat matahari”, *Detik*, diakses pada 8 Januari 2020, <https://news.detik.com/berita/d-3029018/bencana-kabut-asap-di-palangkaraya-sudah-2-bulan-warga-tak-lihat-matahari>

¹⁷ “RI Refuses Singapore’s Help in Forest fires”, *Jakarta post*, <https://www.thejakartapost.com/news/2015/09/12/ri-refuses-singapore-s-help-forest-fires.html>

¹⁸ “Singapore’s offer of Haze Assistance Packages to Indonesia and Malaysia”, *Ministry of The Environment and Water Resources*, <https://www.mewr.gov.sg/news/singapores-offer-of-haze-assistance-packages-to-indonesia-and-malaysia>

¹⁹ “Alasan Jokowi Tolak Bantuan Negara Lain Padamkan Kebakaran”, *Tempo*, 7 Oktober 2015, diakses pada 20 November 2019, <https://nasional.tempo.co/read/707303/alasan-jokowi-tolak-bantuan-negara-lain-padamkan-kebakaran/full&view=ok>

²⁰ Mangadar Situmorang, “Orientasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK”, *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol 11(1),2015, hal 7

Dengan visi tersebut, Jokowi ingin terlihat supaya Indonesia lebih berdaulat dan mandiri dalam penyelesaian permasalahan di negara.

Pada 8 Oktober 2015, Jokowi akhirnya menerima bantuan luar negeri untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Jokowi mengatakan bahwa bantuan luar negeri sangat dibutuhkan karena ketidakmampuan Indonesia untuk mengatasi asap sendirian, sehingga membutuhkan bantuan.²¹ Bahkan, meminta bantuan dari negara-negara lain seperti Rusia dan Jepang untuk ikut membantu memadamkan kabut asap.²² Bantuan luar negeri tersebut diharapkan untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kejadian ini menimbulkan tanda tanya pada sikap Jokowi yang berubah menjadi menerima bantuan luar negeri. Tindakan Jokowi merupakan kontradiksi dari visi Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan mandiri. Selain hal tersebut, sebelumnya Jokowi juga dengan tegas menolak bantuan luar negeri dari Malaysia dan Singapura karena mampu mengatasi sendiri bencana kabut asap. Penulis tertarik untuk menganalisis penyebab dari perubahan kebijakan Jokowi, dalam penerimaan bantuan luar negeri Jokowi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan 2015.

²¹ "Jokowi says RI accepts foreign aid to tackle forest fires", *Jakarta Post*, <https://www.thejakartapost.com/news/2015/10/08/jokowi-says-ri-accepts-foreign-aid-tackle-forest-fires.html>

²² "Jokowi pastikan terima bantuan luar negeri untuk selesaikan kebakaran hutan", *Kompas*, <https://nasional.kompas.com/read/2015/10/08/11200631/Jokowi.Pastikan.Terima.Bantuan.Luar.Negeri.untuk.Selesaikan.Kebakaran.Hutan>

1.3 Pembatasan Masalah

Analisis penulisan ini berfokus pada perubahan sikap Presiden Joko Widodo dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan pada tahun tersebut, Presiden Joko Widodo mengubah keputusan dari menolak bantuan luar negeri menjadi menerima bantuan luar negeri. Tulisan ini tidak memberikan penjelasan mengenai bagaimana kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi ataupun struktur sosial dan ekonomi yang membuat kebakaran hutan dan lahan terjadi di daerah Sumatera dan Kalimantan. Maka dari itu, bagi peneliti yang akan melakukan penelitian perlu untuk membahas mengenai bagaimana struktur sosial dan ekonomi di daerah setempat yang membuat kebakaran hutan dan lahan terjadi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: **“Bagaimana Tekanan Internasional dan Legitimasi Politik Domestik Mempengaruhi Kebijakan Jokowi Dalam Penerimaan Bantuan Luar Negeri Untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2015?”**

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengaruh dari tekanan internasional dan legitimasi domestik dalam mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

1.5.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat berguna sebagai acuan informasi bagi penstudi hubungan internasional yang secara khusus memiliki fokus bidang ilmu pada studi keamanan dan ekonomi, dikarenakan kedua fokus bidang ilmu tersebut sering mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam mengkaji kebijakan luar negeri yang memiliki fokus untuk meneliti proses pengambilan keputusan, keputusan yang diambil oleh pengambil keputusan dapat berubah dari yang sebelumnya sudah ditetapkan. Dalam penelitian ini, lebih dikhususkan untuk melihat bagaimana suatu faktor dapat mempengaruhi proses pembentukan kebijakan luar negeri.

1.6 Kajian Literatur

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai kebakaran hutan dan lahan. Penelitian-penelitian ini, nantinya akan menjadikan referensi penulis yang akan datang. Sumber yang digunakan oleh penulis yaitu tulisan dari Allison Carnegie dan Lindsay Dolan yang berjudul *The Effects of Rejecting Aid on Recipients Reputations: Evidence from Natural Disaster Responses*, tulisan

William J. Jones yang berjudul *Human Security & ASEAN Transboundary Haze: An Idea That Never Came*, dan tulisan Armida S. Alisjahbana dan Jonah M. Busch, yang berjudul *Forestry, Forest Fires, and Climate Change in Indonesia*.

Tulisan dari Allison Carnegie dan Lindsay Dolan yang berjudul *The Effects of Rejecting Aid on Recipients Reputations: Evidence from Natural Disaster Responses* menjelaskan mengenai mengapa negara menolak menerima bantuan luar negeri dari negara lain. Penolakan bantuan dari negara lain dianggap bisa menaikkan citra dari pemerintah. Bisa menaikkan citra pemerintah karena dengan menolak bantuan luar negeri, menunjukkan bahwa mereka mampu untuk menyediakan kebutuhan bagi masyarakatnya. Ada tiga alasan mengapa pemerintah menolak bantuan luar negeri. Pertama, pemerintah ingin dunia melihat bahwa mereka kuat dan kompeten. Menerima bantuan luar negeri menandakan bahwa pemerintah membutuhkan sumber daya eksternal, sebaliknya dengan menolak bantuan luar negeri negara menunjukkan kemandirian dan nantinya mendapat perhatian internasional. Alasan kedua, karena pemerintah ingin menjaga citra atau reputasi di domestik.²³ Pada penelitian ini menunjukkan bahwa bencana alam membuat warga yang terkena dampak memiliki minat yang tinggi dalam politik, maka dari itu apa yang dilakukan oleh pemerintah menjadi dasar untuk pemilu selanjutnya.

Penelitian kedua ditulis oleh William J. Jones pada tulisan yang berjudul *Human Security & ASEAN Transboundary Haze: An Idea That Never Came*

²³ Allison Carnegie dan Lindsay Dolan (2015), "The Effects of Rejecting Aid on Recipients Reputations", *Phd Thesis*, Vol 3, hal 3

menuliskan bahwa pasca kebakaran lahan 1997,²⁴ pada tahun 2003 kepala negara anggota ASEAN melakukan pertemuan untuk membuat rencana bagaimana mengatasi isu lingkungan yang mengganggu stabilitas regional seperti kebakaran asap contohnya. Tulisan tersebut juga menegaskan bahwa asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman kepada *human security* karena membuat ribuan bahkan jutaan orang tidak bisa mengakses hal dasar seperti udara bersih, yang bisa berimplikasi pada kesehatan dan terganggunya aktivitas masyarakat salah satunya adalah aktivitas ekonomi.

Sebagai ancaman dari *human security* maka hal yang diusulkan adalah adanya regulasi yang mengikat dan adanya tata kelola yang baik yang dibuat oleh ASEAN dan mengikat seluruh anggota. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak bisa disalahkan sepenuhnya atas kejadian kebakaran hutan dan lahan karena perusahaan yang menginvestasikan kelapa sawit di Hutan Indonesia juga berasal dari Malaysia dan Singapura.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Helena Varkkey, dalam tulisan yang berjudul “*In 3 Years We Would Have Solved This: Jokowi, ASEAN And Transboundary Haze*”.²⁵ Penelitian tersebut menuliskan langkah pertama Jokowi dalam meratifikasi perjanjian ASEAN tentang polusi asap lintas batas, merupakan langkah yang ingin menunjukkan bahwa kabut asap merupakan prioritas utama dalam program kerjanya. Selain hal tersebut, Jokowi juga mengambil langkah

²⁴ William J. Jones (2014), Human Security & ASEAN Transboundary Hazze: An Idea That Never Came, *Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences*, Vol 5:4, 603-623

²⁵ Helena Varkkey, “ ‘In 3 Years We Would Have Solved This’: Jokowi, ASEAN and Transboundary Haze”, *Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol 8 (3) 2017, 277-295

koordinasi pencegahan di tingkat pusat dan daerah. Hal ini merupakan langkah reformatif dalam penanganan asap.

Kendati demikian, sikap tersebut kontradiktif dengan pernyataan Jokowi dalam suatu wawancara. Jokowi mengatakan dirinya meminta negara anggota ASEAN untuk memberinya waktu ‘tiga tahun’ untuk menyelesaikan asap. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Indonesia ingin dibiarkan sendiri untuk menghadapi masalah kebakaran dan kabut asap selama tiga tahun tanpa gangguan ASEAN.

Berdasarkan kajian literatur di atas, disebutkan terdapat tiga penelitian mengenai kebakaran hutan dan lahan. Pada penelitian pertama fokus pada alasan mengapa negara menolak bantuan luar negeri. Dalam tulisan tersebut adalah ditekankan pada citra pemerintah yang ingin ditingkatkan. Penulis berpendapat bahwa penolakan bantuan luar negeri tidak selalu di karenakan pemerintah yang ingin menaikkan citra di hadapan publik, tetapi juga ada faktor lain seperti pertimbangan kelompok kepentingan. Pada penelitian kedua, penelitian mengenai kebakaran lahan dan hutan difokuskan bagaimana mengatasi ancaman kepada *human security* dari apa yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Untuk mengatasi ancaman kepada *human security* berdasarkan penelitian tersebut, diperlukan sebuah tata kelola yang baik melalui organisasi regional yaitu ASEAN.

Pada penelitian ketiga, penelitian difokuskan mengenai bagaimana kontradiksi antara tindakan dan pernyataan Jokowi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dalam penelitian tersebut, pernyataan Jokowi yang meminta

waktu tiga tahun untuk menyelesaikan masalah kabut asap, merupakan tanda bahwa Jokowi ingin menghadapi permasalahan tersebut sendiri tanpa gangguan ASEAN. Penelitian ini dianggap relevan sebagai data pendukung, karena pada penelitian yang ketiga, diberikan bagaimana sikap Jokowi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan tiga penelitian tersebut, tidak ada satupun yang dapat menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti. Dari sebab itu diperlukan penelitian lanjutan untuk menganalisis bagaimana tekanan internasional dan legitimasi politik memberikan pengaruh pada Jokowi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

1.7 Kerangka Pemikiran

Penelitian dalam tulisan ini akan menggunakan dua konsep yaitu konsep Realisme Neo-Klasikal Gideon Rose, dan teori tekanan internasional dan legitimasi domestik milik Kai He.

Dalam teori Realisme Neo-Klasikal milik Gideon Rose, Kebijakan luar negeri suatu negara dapat dipengaruhi oleh determinan domestik dan determinan internasional. Salah satu yang mempengaruhi perilaku pengambil keputusan dalam kebijakan luar negeri, adalah tekanan dari sistem internasional yang bisa berubah, namun tekanan tidak hanya dilihat dari faktor eksternal saja yang bisa berubah melainkan pada teori ini juga dilihat dengan pendekatan *inside-out*, dengan melihat kondisi politik dalam negeri atau faktor *innenpolitik* suatu negara. Hal ini karena

negara-negara yang memiliki sistem domestik yang sama, sering bertindak berbeda-beda karena dipengaruhi oleh *innenpolitik*.²⁶

Pendekatan sistem internasional berfokus pada pola interaksi antar aktor, maka dari itu pendekatan ini mempelajari pembentukan aliansi, organisasi internasional, ataupun hukum internasional dan membuat generalisasi pada fenomena ini.²⁷ Pola interaksi dalam hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, yaitu adanya institusi internasional. Institusi internasional menyediakan prinsip ataupun norma atau peraturan yang mengatur perilaku negara dalam pengambilan keputusan.²⁸ Kedua, adanya perjanjian atau kerjasama antar negara. Perjanjian atau kerjasama tersebut dapat tertuang dalam hukum internasional. Hukum internasional didefinisikan sebagai perangkat aturan yang mengatur hubungan negara yang secara sengaja dibuat untuk kasus tertentu.²⁹ Kehadiran hukum internasional membatasi langkah dari kebijakan luar negeri, karena negara harus menghargai perjanjian tersebut, untuk menghindari sanksi ataupun sanksi sosial yang lain dari internasional.³⁰

Faktor domestik mempengaruhi dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, karena pemimpin negara tidak selalu memiliki akses yang penuh dalam

²⁶ Gideon rose, "Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy", *World Politics*, Vol 51:1, (1998), 144-172

²⁷ Fatih Tayfur, "Systemic-structural approaches, world-system analysis and the study of foreign policy", *METU Studies in Development*, Vol 27 (3-4) 2000, Hal 266

²⁸ TAMAKI, T., 2015. Levels of analysis of the international system. Dalam buku: Kavalski, E. (ed.) *Encounters with World Affairs: An Introduction to International Relations*. (Farnham: Ashgate), hal. 85-106

²⁹ Joel Westra, *International Law and Foreign Policy Decision-Making*, (Oxford:Oxford University Press, 2017)

³⁰ Bojang AS (2018), The Study of Foreign Policy in International Relations, *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, Hal 7

mengakses seluruh sumber daya yang dimiliki negara.³¹ Faktor domestik disebut sebagai penentu arah politik luar negeri, terdiri dari preferensi elite, persepsi ancaman, keyakinan ideologis, opini publik, dan kekuatan material relatif.³² Penelitian ini akan berfokus pada preferensi elit, keyakinan ideologis, opini publik, dan kekuatan material relatif.

Dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, para pengambil keputusan tidak selalu sendiri. James Fearon dalam tulisan yang berjudul *Domestic Politics, Foreign Policy, and Theories of International Relations* mengatakan bahwa aktor domestik merupakan representatif yang saling melakukan interaksi dan kemudian menciptakan dinamika domestik.³³ Pengambil kebijakan selalu memiliki arus informasi yang di dapat menjadi pertimbangan.

Dalam proses pengambilan kebijakan tersebut, pengambil keputusan mendapatkan informasi dari orang-orang yang disebut sebagai elite. Elite dalam pengambil keputusan bisa dikatakan sebagai individu yang terlibat dalam membuat kebijakan. Susan Peterson dalam tulisan *How Democracies Differ: Public Opinion, State Structure, and The Lessons of The Faashoda Crisis* menjelaskan pentingnya struktur kelembagaan negara dan keyakinan strategis aktor. Menurutnya, struktur kelembagaan negara dan keyakinan strategis aktor adalah kunci dalam keputusan domestik.³⁴ Kepribadian dari seorang pemimpin tersebut, memainkan peran yang

³¹ Gideon rose, hal 161

³² Bob Sugeng, *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis*, (Jakarta: Obor, 2017)

³³ James fearon, "Domestic Politics, Foreign Policy, and theories of international relations", *Annual Review of Political Science*, Vol 1 (1998), 289-313

³⁴ Susan Peterson, "How Democracies differ: Public Opinion, State Structure, and The Lessons of The Faashoda Crisis", *Security Studies*, Vol 5(1) 1995, hal 6

penting dalam kebijakan luar negeri, karena kebijakan luar negeri meliputi proses kognitif, dimana individu pada akhirnya yang sebagai pembuat keputusan, bukan negara.

Ideologi merupakan faktor kunci yang dipertimbangkan dalam merancang kebijakan luar negeri.³⁵ Keyakinan ideologis merupakan teori umum, tentang bagaimana individu atau pemerintah harus bertindak dalam sistem internasional.³⁶ Dalam perjalanan waktunya, konsep ini bisa dikaitkan dengan struktur kekuasaan, bagaimana pemimpin memiliki kekuatan dan menggunakannya.³⁷ Ideologi penting dalam kebijakan luar negeri, karena bisa menentukan bagaimana sebuah keputusan bisa diambil.³⁸ Pengambilan keputusan dalam negara yang demokratis tentu akan jauh berbeda dengan negara yang menganut sistem komunis ataupun otoriter. Maka dari itu, Ideologi menjadi faktor domestik yang penting untuk menentukan bagaimana keputusan bisa diambil.

Opini publik didefinisikan sebagai sikap dari masyarakat terhadap isu kebijakan luar negeri. Masyarakat dalam menyikapi isu kebijakan luar negeri bisa terbagi menjadi dua yaitu setuju terhadap isu tersebut atau sebaliknya tidak setuju.³⁹ Walaupun Publik memiliki pandangan tersendiri, para pengambil keputusan tidak langsung mengikuti pandangan dari opini publik tersebut, bahkan para pengambil keputusan justru membentuk opini publik untuk membuat masyarakat berpendapat

³⁵ Rashid Azhar, "The role of Ideology in foreign policy", *Journal of Political Studies*,

³⁶ Sylvan Majeski, "Ideology and Intervention", *Convention of the international studies*, 2008

³⁷ Kevin Harrison & Tony Boyd, "The Role of Ideology in Politics and Society", dalam *Understanding Political Ideas and Movements*, (Manchester: Manchester University Press, 2018)

³⁸ Ibid.

³⁹ Carlos Sojo, *The State Under Scrutiny: Public Opinion, Stateness and government performance in Latin America*, (Santiago: United Nations, 2011), hal 19

tertentu. Akan tetapi, beberapa pemimpin cukup sensitif terhadap reaksi dari publik, walaupun opini publik seringkali tidak stabil.

Kekuatan relatif merupakan *power* yang dimiliki oleh suatu negara. Disebut sebagai kekuatan relatif karena *power* dalam hal ini masih bisa berubah dan tidak pasti. Kekuatan relatif disebut sebagai *power* yang dimiliki oleh seseorang atau entitas dalam hubungannya dengan entitas lain.⁴⁰

Perubahan mengenai apa yang disebut kekuatan material relatif tergantung dengan pemimpin pada saat itu. Pilihan mengenai kebijakan luar negeri dibuat oleh pemimpin dan elit politik, maka dari itu persepsi mereka mengenai kekuatan relatif penting karena kekuatan relatif bukan selalu berarti kuantitas dari sumber daya.⁴¹ Sifat kepemilikan *power* hanya bersifat sementara dan dapat berubah pada waktunya. Ketika negara memiliki kekuatan relatif yang besar, maka akan tidak terbatas situasinya preferensi kebijakannya ketika mengambil kebijakan, sedangkan ketika berada pada *power* yang rendah maka preferensi tindakan yang diambil negara akan terbatas dalam sistem internasional.⁴² Maka dari itu, analisis mengenai *power* harus dilihat dari kekuatan dan struktur negara tersebut ke masyarakat karena bisa berdampak ke proporsi sumber daya nasional yang bisa dialokasikan ke kebijakan luar negeri.

Selain konsep diatas penulis juga menghubungkan keterkaitan antara faktor internasional dan domestik dengan menggunakan teori *International pressure-*

⁴⁰ Carlos Sojo, *The State Under Scrutiny: Public Opinion, Stateness and government performance in Latin America*, (Santiago: United Nations, 2011), hal 19

⁴¹ Gideon rose hal 147

⁴² Ibid.

domestic legitimacy model milik Kai He. Konsep tersebut memberikan penjelasan mengenai interaksi antara tekanan internasional dan legitimasi domestik dalam pembentukan kebijakan pengambil keputusan. Dalam kebijakan luar negeri, satu aspek tidak bisa berdiri sendiri. Kai He lebih lanjut mengatakan, ketika tekanan internasional tinggi sekalipun, pengambil keputusan tidak akan selalu mengikut kehendak internasional karena didasari oleh faktor legitimasi domestik. Di satu sisi, tekanan internasional bisa digunakan untuk menaikkan legitimasi domestik ataupun menguji legitimasi domestik.

Tekanan internasional dalam kebijakan luar negeri merupakan variabel independen. Disebut sebagai variabel independen, dengan mengambil konsep realisme soal sifat sistem internasional yang bersifat anarki. Sistem internasional bersifat anarki, dan negara mencari keamanan untuk melindungi teritori atau warganya dengan mengandalkan perilaku sendiri.⁴³ Hal ini dikarenakan dalam sistem anarki tidak ada organisasi yang menjadi pengadil di atas negara-negara. Keamanan menjadi nilai paling penting dalam sistem internasional, karena negara adalah aktor yang paling penting dalam sistem internasional.⁴⁴

Perubahan geopolitik, tindakan yang dilakukan aktor lain ataupun interaksi yang membentuk ancaman akan membuat tekanan internasional.⁴⁵ Suatu tekanan

⁴³ Kai He, Indonesia's foreign policy after Soeharto: international pressure, democratization, and policy change, *International Relations of the Asia-Pacific*, (2007), Hal 14

⁴⁴ N.M. Ripsman, *Neoclassical Realism and domestic interest groups*, hal 176 dalam buku Steven Lobell, Norrin Ripsman, Jeffrey Taliaferro, *Neoclassical Realism, The State, And Foreign Policy*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009)

⁴⁵ Nabin Kumar Khara, "Determinants of Foreign Policy: A Global Perspective", *International Journal of Research and Analytical Reviews*, Vol 5:3 (2018), hal 107

akan memberikan pengaruh kepada arah kebijakan atau perilaku suatu negara.⁴⁶ Semua negara, harus waspada dan bereaksi terhadap suatu ancaman terlepas dari kemampuan ataupun posisi mereka dalam sistem internasional.

Faktor kedua yang mempengaruhi kebijakan luar negeri adalah legitimasi domestik. Legitimasi politik domestik merupakan determinan utama apabila pemimpin ingin mengoperasikan negara. Dalam konsep kekuasaan, suatu pemerintahan akan bisa berjalan efektif apabila didukung oleh otoritas dan legitimasi. Kai He dan Huiyun Feng dalam buku yang berjudul *Prospect Theory and Foreign Policy Analysis in The Asia Pacific* mengatakan hal serupa, para pengambil keputusan sebelum mengambil kebijakan luar negeri harus memiliki legitimasi dalam menjalankan kepemimpinannya terlebih dahulu dengan memusatkan perhatian pada otoritas politik di domestiknya.

Dalam demokrasi, otoritas politik dalam konsep pemerintahan yang demokratis merujuk pada bagaimana pemimpin terpilih dapat menjaga kepercayaan publik dalam menjalankan konstitusinya.⁴⁷ Sebab dalam sistem demokrasi, publik adalah pelanggan dari pelayanan pemerintah. Sebagai pelanggan, publik bisa meminta pelayanan yang baik dengan ditempatkan pertama sebagai prioritas dan

⁴⁶ Burim Mexhuani, "The Foreign Affairs of a States Is Based on Its Strength in the International System", *European Journal of Social Sciences Education and Research*, Vol 4(4) 2017, 323

⁴⁷ Kai He dan Huiyun Feng, *Prospect Theory and Foreign Policy Analysis in Asia Pasific: Rational leaders and Risky behavior*, (New York:Routledge,2012) hal 10

pelayanan yang cepat.⁴⁸ Maka, legitimasi negara akan semakin kuat sejalan dengan dukungan kepada pemerintah besar.⁴⁹

Dari dua interaksi di atas, pemimpin negara nantinya akan mengeluarkan kebijakan yang bersifat *balancing* atau *compromising*. Kebijakan yang bersifat *balancing* dibagi dua yaitu internal dan eksternal. Kebijakan yang bersifat *compromising* dibagi menjadi dua yaitu *compromising in deeds* dan *compromising in words*. Kebijakan *compromising in deeds* terjadi ketika legitimasi politik rendah tetapi tekanan internasional tinggi.⁵⁰ Menyebabkan kebijakan yang mengikuti bagaimana keinginan dari tekanan internasional. Sedangkan kebijakan *compromising in words*, terjadi ketika baik tekanan internasional rendah dan legitimasi politik rendah.⁵¹ Sehingga, kebijakan yang dihasilkan adalah tidak melakukan apa-apa.

Kebijakan yang bersifat *external balancing* akan muncul ketika pemimpin negara berada pada tekanan internasional yang tinggi dan disisi lain memiliki legitimasi politik domestik yang kuat.⁵² Sehingga kebijakan yang dikeluarkan adalah mencari aliansi dari negara-negara lain untuk menghadapi tekanan dari negara yang lain. Kebijakan *internal balancing* terjadi ketika tekanan internasional rendah, sebaliknya legitimasi politik domestik kuat. Hal ini menyebabkan kebijakan

⁴⁸ Menro Hurenkamp, Evelien Tonkens, & Jan Wilem Duyvendak, "The Delegitimation of Political authority", dalam *Crafting Citizenship*, (London: Palgrave Macmillan, 2012), hal 43

⁴⁹ Bruce Gilley, "The Determinants of State Legitimacy: Results for 72 Countries", *International Political Science Review*, Vol 27 (2), 2006, hal 47-71

⁵⁰ Kai He, Indonesia's foreign policy after Soeharto: international pressure, democratization, and policy change, *International Relations of the Asia-Pasific*, (2007), Hal 14

⁵¹ Ibid, Hal 16

⁵² Ibid, Hal 19

yang dikeluarkan adalah fokus pada kebijakan internal dan tidak terlalu menaruh perhatian pada sistem internasional.⁵³

1.8 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.8.1 Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode yang mengkonstruksi realitas dan memahami makna, dengan memperhatikan proses, peristiwa, dan otensitas, dengan memandang realitas sebagai hasil rekonstruksi oleh individu yang terlibat dalam situasi sosial.⁵⁴ Penelitian ini menggunakan klasifikasi kualitatif studi kasus. Metode ini menjelaskan kasus sebagai *bounded system* yaitu sebuah sistem tidak bisa berdiri sendiri karena untuk memahami suatu kasus perlu untuk memperhatikan kasus yang lain.⁵⁵ Tujuan dari penggunaan klasifikasi kualitatif ini adalah untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu kasus dapat terjadi.⁵⁶

1.8.2 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode studi pustaka. Pengumpulan data melalui studi pustaka bersumber dari buku, jurnal, publikasi, ataupun laporan. Diluar hal tersebut, peneliti

⁵³ Hal 22

⁵⁴ Deborah K van, den Hoonard. "Qualitative Methods in Social Research / Qualitative Research Methods." *The Canadian Review of Sociology and Anthropology* 40, no. 1 (02, 2003): 116-118, <https://search.proquest.com/docview/234925736?accountid=31495>

⁵⁵ John W. Creswell & Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design* (London:Sage, 2014), Hal 160

⁵⁶ Ibid.

juga akan menggunakan data yang bersumber dari situs resmi baik itu dari media, pemerintah, dan organisasi resmi.

1.9 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi ke dalam empat bab dan di tiap bab akan memuat pembahasan-pembahasan mengenai topik penelitian. Penjelasan mengenai bab yang akan dibahas dalam penelitian ini:

BAB I – Desain Penelitian. Pada bagian ini, penulis memaparkan dasar dari penelitian, yaitu latar belakang kebakaran hutan dan lahan serta permasalahan yang ditimbulkan dari isu ini. Masalah mengenai kebakaran hutan dan lahan merupakan hal yang penting untuk diteliti karena mengganggu keamanan nasional, dalam hal ini keamanan non tradisional, serta berdampak pada negara lain yang mengakibatkan hubungan negara menjadi renggang. Dalam Literatur seperti jurnal penyelesaian permasalahan kebakaran hutan dan lahan hanya dibahas mengenai soal bagaimana penyelesaiannya, dan tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan penelitian dari penulis. Dari sebab itu, diperlukan lanjutan penelitian. Teori yang menjadi kerangka bagi penelitian ini adalah *the international pressure-political legitimacy model* Kai He.

BAB II – Kondisi Internasional dan Domestik Sebagai Pertimbangan Bagi Joko Widodo

Pada bab ini penulisan dibagi menjadi dua bagian:

II.I. Faktor Internasional

Pada bagian ini dijelaskan mengenai kondisi internasional di Kawasan Asia Tenggara yang menjadi pertimbangan bagi Jokowi. Tulisan ini terdiri dari pola interaksi di Kawasan Asia Tenggara dan Hukum Internasional yang ada untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan.

II.II Faktor domestik

Pada bagian ini dijelaskan bagaimana kondisi domestik dalam Negara. Tulisan ini terdiri atas demokrasi sebagai sistem pemerintahan, kepentingan pengambil kebijakan, dan opini publik atas kebakaran hutan dan lahan.

BAB III – Interaksi Antara Tekanan Internasional dan Legitimasi Domestik Sebagai Pembentuk Kebijakan Jokowi. Dengan dasar data-data yang ditunjukkan di bab sebelumnya, maka pada bagian ini menjelaskan interaksi dari tekanan internasional dan legitimasi domestik dalam memberikan pengaruh pada kebijakan Jokowi.

BAB IV – Kesimpulan. Dengan dasar-dasar data, teori, dan analisis yang sudah dilakukan pada bagian sebelumnya, penulis memaparkan hasil analisis dan pembahasan dari kasus ini secara singkat serta kesimpulan yang bisa diambil dari kasus ini.